



kiprah

No. 4/Tahun XII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

APR 2026

Editor's
Choice

448 Tahun
Sudah Harus
Kadeuleu, Karampa,
Karasa

Rutilahu

Banyak Penghuni Rutilahu
Tinggal di Tanah Kas Desa

Fokus Pertumbuhan Berkualitas

Selamat Memperingati

Hari Kartini

21 APRIL 2026



Contents

April 2026

Dasar Hukum untuk
Alokasikan Cadangan
Pangan

7

3 On The Cover

Fokus Pertumbuhan
Berkualitas dan Inklusif



Kemajuan Harus
Memiliki Jati Diri

11

Ini Progres dan
Perubahan Sumedang

13

Tahun 2025, Tahun
yang Tidak Mudah

17

21

Tingkat Pengangguran
Didominasi Lulusan SMK

Penanganan Jalan
Belum Optimal karena
Keterbatasan Anggaran

26

Pilkades Serentak
dengan Hybrid

32



SalamRedaksi

Cadangan

Arah pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Produktivitas Sektor Ekonomi”. Tema tersebut menandai pergeseran dari pertumbuhan tinggi menuju pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif.

Tema pembangunan ini dimunculkan saat pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kabupaten untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2027. Forum Musrenbang ini menjadi tahapan strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fokus prioritas pembangunan tahun mendatang.

Musrenbang RKPD 2027 tersebut, Pemkab Sumedang berharap rumusan program pembangunan yang dihasilkan dapat lebih fokus, terukur, dan selaras dengan tema pembangunan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sidang pembaca yang budiman, Pemkab Sumedang mengajukan Raperda Cadangan Pangan ke DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD Sumedang.

Faktor bencana alam seperti musibah banjir, longsor, dan kekeringan turut mempengaruhi ketersediaan pangan di suatu daerah. Pemerintah seringkali tidak mempunyai cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan warga.

Ketersediaan pangan yang menipis, hilang, jelek dan buruk harus dipenuhi oleh pangan yang sudah disiapkan sebagai cadangan pangan. Dibutuhkan regulasi agar pemerintah bisa membuat dan memutuskan ketersediaan pangan dan mengontrol harganya demi bisa menyediakan cadangan pangan.

Diterbitkan oleh :

**HUMAS
DPRD
Sumedang**

Alamat Redaksi :
Jl. Pangeran Soeriatmadja No. 10
Sumedang.
Telp (0261) 201229
Fax (0261)207335

Pelindung : Ketua DPRD, Sidik Jafar, S.E.
Penasehat : Wakil Ketua DPRD, Atang Setiawan, S.E., H. Mulya Suryadi, S.Pd.,M.Kom.,
Ruli Aditya,
Pengarah : M. Yusuf Sahrulloh, S.STP.,M.Si.
Pemimpin Redaksi, Ketua Tim : Yuyun Susiva WN, S.E., M.M.
Sekretaris : Widi Mujisantoso, S.Sos.
Redaksi : Yuyun Susiva WN, S.E., M.M. , Atien Nurbaeti, S.Ag., Toufik Setiawan, S.E., Suherman Santika,
Angga Aris Surya, S.STP., Yanti Hurhayati, S.Sos, Cecep Wachdiana P, Deddi Rustandi, Vera Suciati
Rilis, Kliping & Relay Radio : Usep Saepudin, S.Ag., M. Iqbal Nugraha, Rachmat Fajar Agung, S.T.
Desain & Layout : Yanyan Hijriana



SIDIK JAFAR, S.E.
KETUA DPRD KABUPATEN SUMEDANG

Fokus Pertumbuhan Berkualitas dan Inklusif

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kabupaten untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2027. Forum Musrenbang ini menjadi tahapan strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fokus prioritas pembangunan tahun mendatang.

Musrenbang dihadiri Ketua DPRD Jafar Sidik, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir didampingi Wakil Bupati M. Fajar Aldila bersama unsur Forkopimda, perangkat daerah, para camat, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat di Aula Tampomas Setda, Selasa (7/4/2026).

Bupati menegaskan, Musrenbang RKPD Tahun 2027 harus difokuskan pada peningkatan kualitas pertumbuhan

pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, capaian indikator makro Kabupaten Sumedang tahun 2025 menunjukkan tren positif dan menempatkan Sumedang pada peringkat ketiga di Jawa Barat.

"IPM tahun 2025 yaitu 75,50, perubahan dari tahun 2024 ke 2025 naik menjadi 0,93. Dari posisi IPM ini, yang menunjukkan maju dan sejahteranya sebuah daerah dari indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan daya beli, maka Kabupaten Sumedang berada pada posisi ranking tiga di Jawa Barat dibandingkan kabupaten lainnya," ujarnya.

Selain itu, angka kemiskinan Kabupaten Sumedang juga mengalami penurunan menjadi 8,81 persen atau turun 0,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bupati menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus diarahkan pada pengurangan kemiskinan multidimensi.



Bupati menjelaskan bahwa indikator pemerataan ekonomi juga menunjukkan tren positif dengan rasio gini sebesar 0,377. Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,48 persen, sementara PDRB per kapita meningkat menjadi Rp42,65 juta atau naik Rp2,95 juta.

"Arah perbaikan rasio gini adalah kebijakan harus berfokus pada pemerataan kesempatan ekonomi dan distribusi antar desil khususnya bottom 40. Sedangkan arah perbaikan pertumbuhan ekonomi, fondasi struktural perlu diperkuat seperti produktivitas sektor unggulan, hilirisasi, dan mitigasi risiko iklim pertanian. Kemudian arah perbaikan PDRB adalah fokus pada produktivitas sektor unggulan dan inklusivitas pertumbuhan," terangnya.

Bupati menegaskan, arah pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2027 mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Produktivitas Sektor Ekonomi". Tema tersebut menandai pergeseran dari pertumbuhan tinggi menuju pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif.

"Apapun yang ada di pikiran kita harus mengarah pada pencapaian tema. Bagaimana menangkap peluang program strategis nasional dan akselerasi potensi ekonomi daerah. Manfaatkan peluang nasional,

kolaborasikan dengan potensi daerah sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat Sumedang," tegasnya.

Ia menambahkan, dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah daerah harus meningkatkan upaya secara lebih optimal. "Harus extra effort yang lebih tinggi, karena kalau kita menggunakan pendekatan sistem, hasil kerja adalah interaksi keterkaitan fungsional antara elemen-elemen yang ada," ungkapnya.

Bupati menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan di era Society 5.0. "Di era 5.0 saat ini, peran pemerintah hanyalah fasilitator dan rakyat adalah co-creator. Pemerintah harus menjadi fasilitator yang baik, dan yang berkreasi serta kreatif adalah publik atau masyarakat," katanya.

Melalui Musrenbang RKPD 2027 tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berharap rumusan program pembangunan yang dihasilkan dapat lebih fokus, terukur, dan selaras dengan tema pembangunan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[*]

Program Nasional di Sumedang harus Membuka Lapangan Kerja



Ketua DPRD Sidik Jafar mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah saat hadir di Musrenbang RKPD Tahun 2027 yang digelar di Aula Tampoman, Pusat Pemerintahan Sumedang, Selasa 7 April 2026.

Jafar menyampaikan apresiasi atas capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat.

"Capaian ini harus menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Tahun 2026 kita harapkan tren positif ini tidak hanya bertahan, tetapi semakin meningkat, khususnya dalam kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja," ujar Jafar.

Ia menyatakan dukungan DPRD terhadap tema pembangunan tahun 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan produktivitas sektor ekonomi. Tema tersebut dinilai relevan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

"Sumedang harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan, bukan sekadar penonton. Setiap peluang investasi dan program nasional harus dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

DPRD juga menyoroti dua prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu penataan kawasan Jatinangor sebagai pusat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi agar lebih terintegrasi, serta pengembangan kawasan Buahdua, Ujungjaya, hingga Tomo sebagai kawasan industri baru.

"Kami mendorong agar potensi kawasan industri baru ini segera ditata secara matang, sehingga benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan menyerap tenaga kerja lokal," katanya.

Ketua DPRD menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam perencanaan pembangunan. "Melalui Musrenbang ini, semua pihak harus merasa memiliki setiap program yang disepakati. Dengan kebersamaan, kita bisa mendorong Sumedang tumbuh lebih cepat dan merata," katanya. [*]

Kawasan Industri Butom Ditata Ulang

PEMERINTAH Daerah Kabupaten Sumedang mengatur ulang strategi pengembangan ekonomi kawasan industri Buahdua, Ujungjaya, Tomo (Butom) untuk tahun 2027. Re-arrangement BUTOM merupakan pengaturan ulang strategi pengembangan ekonomi wilayah tanpa menggugurkan legalitas dasar ruang yang telah ada.

"Re-arrangement Butom memiliki dasar ruang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kawasan industri, namun pertumbuhan kawasan belum berkembang signifikan. Pasal 35 UU Cipta Kerja bahwa klaster industri dapat berbasis sumber daya lokal," kata Sumedang Bupati Dony Ahmad Munir.

Menurutnya, klastering industri di Kawasan Rebana akan dikembangkan di Subang dan Indramayu, sedangkan Sumedang difokuskan sebagai daerah hilirisasi pertanian dan wisata pegunungan. "Sektor pertanian tanaman pangan padi di Kawasan Butom terutama di Buahdua dan Ujungjaya masih menjadi penggerak ekonomi masyarakat," katanya.

Buahdua menjadi fokus pengembangan padi organik dengan sentra lokus di Desa Cikurubuk. Sedangkan Ujungjaya fokus ke integrasi dan hilirisasi usaha tani padi dengan sentra lokus Desa Sukamulya.

Topografi lahan sawah di Ujungjaya datar kemudian ada Bendung Cariang sedang direhabilitasi yang akan mengairi sawah seluas 1.603 hektare. Selain itu pengairan pertanian diperkuat dengan Bendung Cipanas yang dapat menyuplai air irigasi seluas 3.000 hektare.

Aksesibilitas yang mantap karena berdekatan Tol Cisumdawu

dan Tol Cipali. "Bantuan alsintan modern seperti combine harvester, traktor

roda 4, rotavator kebanyakan dialokasikan ke Ujungjaya mengingat alsintan tersebut dioperasikan pada lahan sawah yang datar," katanya.

Sementara Tomo fokus ke agro-olah dan ekspor Mangga Gedong Gincu dengan sentra lokus Desa Jembarwangi, Desa Karyamukti, dan Desa Tolengas.

Dony mengatakan arah re-arrangement adalah pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian. "Fokus pengembangan integrasi dan hilirisasi sistem pertanian yang didukung dengan sistem logistik terpadu dan feasible untuk penanaman modal," katanya.

Untuk mewujudkannya, Pemkab Sumedang terus melakukan sosialisasi ke pemangku kepentingan Penetapan status area dan lahan bersama seluruh pihak terkait. Dilakukan juga penguatan kelembagaan ekonomi, pembinaan dan keterpaduan antar kelembagaan ekonomi masyarakat dan kawasan pendampingan. [*]



Dasar Hukum untuk Alokasikan Cadangan Pangan

Faktor bencana alam seperti musibah banjir, longsor, dan kekeringan turut mempengaruhi ketersediaan pangan di suatu daerah. Pemerintah seringkali tidak mempunyai cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan warga.

Ketersediaan pangan yang menipis, hilang, jelek dan buruk harus dipenuhi oleh pangan yang sudah disiapkan sebagai cadangan pangan. Dibutuhkan regulasi agar pemerintah bisa membuat dan memutuskan ketersediaan pangan dan mengontrol harganya demi bisa menyediakan cadangan pangan.

Untuk itulah, Pemkab Sumedang mengajukan Raperda Cadangan Pangan ke DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Kamis 23 April 2026. Raperda ini nantinya akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemda untuk mengalokasikan APBD dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan, sehingga terhindar dari masalah hukum.

Raperda ini juga akan menjadi perlindungan bagi petani atau produsen pangan

lokal. "Cadangan pangan yang dibeli dari hasil panen lokal pada saat harga turun dapat melindungi petani dari anjloknya harga, sekaligus menyerap produksi pangan daerah," kata Bupati Dony Ahmad Munir dalam nota pengantar raperda.

Raperda memungkinkan pemda untuk mengintervensi pasar secara cepat melalui penyaluran cadangan pangan saat terjadi gejolak harga pangan, sehingga mencegah inflasi tinggi di wilayah tersebut.

Pemda juga dapat mempercepat respons terhadap krisis pangan akibat bencana alam atau sosial tanpa harus bergantung penuh pada bantuan pemerintah pusat, karena kebutuhan pangan sudah tersedia di daerah. [v]



Penguatan Ketahanan Pangan Desa



Raperda Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan mendorong pengadaan cadangan pangan hingga ke level desa. Memungkinkan komunitas lokal lebih mandiri dalam menghadapi kekurangan pangan. Selanjutnya, terdapat sisi lain yang penting adalah diversifikasi cadangan pangan yang tidak hanya beras, tetapi juga pangan pokok lokal lain seperti jagung, umbi-umbian yang diatur sesuai kearifan lokal.

Hal lain yang menyebabkan Raperda ini penting dibuat adalah sebagai antisipasi kondisi darurat ekonomi.

"Penyediaan pangan yang terjangkau saat terjadi penurunan pendapatan masyarakat atau krisis ekonomi yang menyebabkan rawan pangan kronis," jelas Bupati Dony Ahmad Munir.

Secara keseluruhan, perda cadangan pangan ini bertujuan menciptakan sistem

keterjangkauan pangan yang stabil dari aspek fisik maupun ekonomi bagi masyarakat.

Secara substansi, Raperda ini mengatur beberapa hal pokok, yaitu penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah daerah.

Raperda ini juga akan mengatur sasaran penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Selanjutnya, akan diatur juga tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta bagaimana cara penanggulangan krisis pangan.

Selain itu, dibutuhkan pengaturan atas peran serta masyarakat. Seterusnya adalah soal pendanaan, pengawasan dan pelaporan.

Dengan pengaturan yang komprehensif tersebut, diharapkan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.[v]

Manajemen Berdasarkan Jumlah Pelanggan

Perda 5 Tahun 2020 Kabupaten Sumedang diubah sebagai tindak lanjut dan amanat atas Permendagri 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum. Permendagri ini terbit menggantikan peraturan lama yaitu Permendagri 2 Tahun 2007 dengan fokus pada profesionalisme, efisiensi, dan restrukturisasi manajemen berbasis jumlah pelanggan.

Raperda Perubahan Perda 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang diajukan melalui Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Kamis 23 April 2026.

"Berdasarkan dari Permendagri 23 Tahun 2024, maka Perda tersebut diubah. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaturan pemerintah atas salah satu urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah yaitu pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum," kata Bupati Dony Ahmad Munir.

Aturan baru ini menetapkan batas operasional yang lebih ketat, maksimal 55% Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, penyesuaian jumlah direksi, serta penguatan Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Terdapat perbedaan utama antara Permendagri No. 23 Tahun 2024 dan peraturan sebelumnya. Yaitu restrukturisasi direksi dan

pengawas yang pengaturan organ BUMD akan disesuaikan dengan skala perusahaan. Skala perusahaan terdiri atas skala kecil, sedang, dan besar berdasarkan jumlah pelanggan dan bukan sekadar wilayah administratif.

Untuk skala kecil, jumlah direksi maksimal 1 orang. Skala sedang adalah direksi maksimal 3 orang. Serta skala besar maka direksi maksimal 5 orang.

Adapun untuk pembatasan biaya operasi ditujukan untuk efisiensi. Yaitu, batas maksimal biaya operasi pegawai ditetapkan lebih ketat untuk mendorong efisiensi. Pengaturan tentang GCG adalah perusahaan harus fokus pada pengelolaan SDM yang berintegritas dan profesional, serta penyesuaian kelembagaan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

Hal ini merupakan bagian penting dalam menjamin hak dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Seiring dengan dinamika regulasi di tingkat nasional, pemerintah telah menetapkan Permendagri 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Ketentuan ini membawa konsekuensi perlunya penyesuaian terhadap peraturan daerah yang ada, khususnya yang berkaitan dengan struktur organisasi dan tata kelola kepegawaian pada perumda air minum.[v]

Maksimal 3 Direksi



Substansi yang diatur dalam raperda perubahan Perda 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang ini, antara lain tugas, kewajiban, wewenang, dan penghasilan anggota dewan pengawas serta mekanisme pengisian kekosongan jabatan anggota dewan pengawas.

Hal lain yang tentu akan diatur adalah organ pendukung dewan pengawas serta penentuan jumlah anggota direksi.

Jumlah direksi di perusahaan ditentukan berdasarkan klasifikasi jumlah pelanggan, penghasilan anggota direksi dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan anggota direksi.

Jika dilihat dari jumlah pelanggan Perumda Tirta Medal yaitu 36.000 pelanggan, maka skala perusahaan masuk dalam kategori

sedang dengan maksimal direksi 3 orang. Namun, hal ini masih akan dibahas lebih lanjut melalui berbagai pertemuan.

Perubahan atas peraturan daerah ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa tata kelola Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang semakin profesional, adaptif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih dari itu, perubahan ini juga diharapkan dapat memperkuat kinerja perusahaan daerah dalam memberikan pelayanan air minum yang lebih optimal, meningkatkan cakupan layanan, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. [v]

Kemajuan Harus Memiliki Jati Diri



DPRD menggelar Rapat Paripurna Istimewa memperingati Hari Jadi Sumedang, Rabu 22 April 2026. Semua peserta yang hadir, baik anggota DPRD maupun tamu undangan semuanya mengenakan busana adat Sunda.

Ketua DPRD Sidik Jafar menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Sumedang atas kontribusinya dalam membangun daerah yang semakin maju, berdaya saing, dan berkarakter.

"Peringatan hari jadi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat sinergi dalam pembangunan, mengakselerasi transformasi digital, serta menjaga dan melestarikan kearifan lokal sebagai identitas daerah," ujarnya.

Ia menegaskan, pengembangan Sumedang sebagai kota digital harus berjalan seimbang dengan pelestarian budaya, sehingga kemajuan yang dicapai tetap memiliki jati diri.

"Momentum Hari Jadi ke-448 ini juga menjadi penguat komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi

terwujudnya Sumedang yang sejahtera dan berkelanjutan," katanya.

Peringatan Hari Jadi ke-448 Sumedang merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus bentuk apresiasi terhadap segala pencapaian berkebudayaan, hasil cipta, karya, dan karsa yang telah diperjuangkan oleh para leluhur di tanah Sumedang Larang.

"Namun kami menyadari bahwa dalam perjalanan pembangunan, masih terdapat berbagai harapan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumedang. Kami akan terus melakukan perbaikan, inovasi, dan percepatan pembangunan, dengan dukungan dan pengawasan konstruktif dari DPRD sebagai representatif rakyat," kata

Bupati Dony Ahmad Munir.

Acara dihadiri anggota DPR RI Dapil Jabar IX Jefry Romdonny, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Edi Askari, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, perwakilan kepala daerah dari kabupaten tetangga, para mantan bupati, wakil bupati dan sekda periode sebelumnya, unsur Forkopimda, ketua dan para wakil ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, para kepala SKPD, camat dan tamu undangan lainnya.

Bupati Dony menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada pimpinan dan anggota dewan atas keajaiban sama dan dukungan yang selama ini terjalin dan tumbuh secara harmonis dan sinergis antara legislatif dan eksekutif serta seluruh warga masyarakat. "Alhamdulillah capaian-capaian yang selama ini diraih menjadi capaian yang memberikan manfaat dan bisa dibanggakan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang," ujarnya. [*]

448 Tahun Sudah Harus Kadeuleu, Karampa, Karasa



Peringatan Hari Jadi mengusung tema Simpatina Kadeuleu, Karampa, Karasa. Tema tersebut mengandung makna mendalam, bahwa setiap langkah pembangunan harus dapat terlihat nyata, terukur hasilnya, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya hadir sebagai program tetapi hadir sebagai solusi atas kebutuhan rakyat.

"Di tengah segala keterbatasan, kami terus meningkatkan capaian pembangunan, menciptakan inovasi, serta berusaha mengukir prestasi. Pada awal kepemimpinan Dony-Fajar 2025-2026 sebanyak 17 penghargaan telah diraih, semua itu tiada lain berkat kerja keras dan kerja sama segenap komponen yang membawa Sumedang terus melangkah maju," kata Bupati Dony Ahmad Munir.

Bupati menyebutkan capaian pembangunan yang telah diraih di awal kepemimpinan Dony-Fajar antara lain, peringkat 1 nasional keterbukaan informasi publik, peringkat 1 nasional indeks pelayanan publik tahun 2025, peringkat 5 nasional dan 1 provinsi Jawa Barat Indeks Daya Saing

Daerah (IDSD) dengan 9 indikator, Kabupaten Pelopor UMKM Digital, dan pesantren award. "Penghargaan bukan tujuan utama, yang menjadi tujuan utama adalah mensejahterakan masyarakat dan menjadi kebanggaan serta memotivasi," ujarnya.

Adapun pencapaian target-target makro pembangunan di Kabupaten Sumedang tahun 2025 diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,50 poin, tingkat kemiskinan 8,81 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,08 persen, Gini Ratio 0,377, Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,49, dan PDRB per kapita Rp 42,65 juta.

"Kami menyadari tantangan kedepan tidak ringan, dinamika global sangat berdampak terhadap multi sektor, cepatnya perubahan, tekanan ekonomi, transformasi digital, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat dan transparan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengajak semua elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa cinta kepada Sumedang, bangga sebagai warga Sumedang," katanya. [*]

Ini Progres dan Perubahan Sumedang

BUPATI Sumedang Dony Ahmad Munir beberkan beberapa program unggulan yang menyentuh langsung masyarakat, dan secara umum telah menunjukan perubahan yang positif. Hal tersebut diungkapkan Bupati saat memberikan sambutan pada acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumedang Ke-448 tahun 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (22/4/2026).

Program unggulan yang telah dilaksanakan antara lain bidang pendidikan melalui program sekolah ramah lingkungan tahun 2025 telah dilaksanakan rehabilitasi ruang kelas SD sebanyak 169 ruang, SMP 49 ruang, PAUD 16 ruang. "Pembangunan ruang kelas baru SD 7 ruang, SMP 9 ruang, PAUD 3 ruang. Selanjutnya rehabilitasi toilet SD 71 unit, SMP 37 unit. Kemudian pembangunan toilet baru 44 unit, pembangunan dan rehabilitasi perpustakaan 21 unit," tuturnya.

Menurut Bupati kebijakan tersebut terus didorong sinergi dengan peningkatan kompetensi guru, kurikulum yang relevan, lingkungan belajar yang semakin nyaman sehingga target wajib belajar 9 tahun lebih jauhnya 12 tahun dapat diakselerasi. "Dampaknya angka harapan lama sekolah meningkat dari 13,02 tahun 2024 menjadi 13,21 tahun 2025. Dan rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,74 tahun menjadi 8,92 tahun," terangnya.

Selanjutnya untuk bidang infrastruktur melalui program jalan leucir nepi ka desa, tahun 2025 penanganan sebanyak 57 ruas jalan, tahun 2026 dilanjutkan 66 ruas jalan dan 3 jembatan dan pemasangan 434 titik PJU. "Termasuk pembangunan jalan lingkaran utara Jatigede sepanjang 4,24 KM, jalan Poros Jingsang, Surian Sanca. Program ini telah terbukti memperlancar aksesibilitas dan mobilitas perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang," terangnya.





Kemudian bidang ekonomi dan UMKM, melalui program Wirausaha Muda dan UMKM Unggul selama tahun 2025 telah dilaksanakan pelatihan keterampilan kerja di BLK untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja. Pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, bantuan sarana UMKM, peresmian dan penguatan UMKM Center serta rumah kemasan.

"Kemudian bidang pertanian melalui program revolusi pertanian (revolper) 4A (ada air, ada benih, ada pupuk dan ada alsintan. Begitupun bidang sosial dan kesehatan diwujudkan melalui pemberian insentif kadeudeuh simpati kepada 9.865 kader posyandu, 7.314 anggota Satlinmas, dan 4.500 guru ngaji," paparnya.

Selama tahun 2025-2026 keberadaan ruang publik terus ditata seperti penataan alun-alun, penataan sport centre Tadjimalela, penataan jogging track dan mini soccer di kompleks PPS Sumedang yang sudah fungsional yang bersumber

dari dana CSR dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. "Mari kita tumbuhkan rasa empati. Ketika kabupaten yang kita cintai meraih capaian yang baik kita sama-sama syukuri, begitu pula ketika kabupaten kita mendapat kendala, ujian, kita turut prihatin dan hadir menjadi bagian yang solutif," kata Bupati Dony

Menurut Bupati momen hari jadi menjadi penguat komitmen pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mendukung dan menyukseskan berbagai program strategis nasional seperti MBG, program 3 juta rumah, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, serta KDKMP. "Untuk itu kami mengajak DPRD Kabupaten Sumedang untuk terus memperkuat fungsi pengawasan yang konstruktif, memastikan kualitas belanja daerah semakin efektif dan menjaga stabilitas politik yang kondusif, karena tanpa stabilitas pembangunan tidak akan optimal," katanya.[*]

Menjaga Pertanggungjawaban Kinerja Bupati



DPRD menelaah kinerja Pemkab Sumedang yang dipimpin Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2025.

Wakil Ketua DPRD Atang Setiawan mengatakan agenda ini memang menjadi agenda rutin bagi Lembaga DPRD. Kendati demikian, hal ini bukan rutinitas administrative belaka melainkan melainkan wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme checks and balances.

"DPRD sudah menerima LKPj Bupati Sumedang sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi karena laporan ini juga menjadi media bagi kepala daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan capaian kinerja program

pembangunan kepada publik melalui DPRD," kata Wakil Ketua DPRD Sumedang Atang Setiawan usai menerima LKPj Tahun 2025 Bupati Sumedang yang digelar melalui Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Jumat, 27 Maret 2026.

Menurut Atang, melalui LKPj maka memungkinkan adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan memberikan rekomendasi atas laporan tersebut. Hasil pembahasan LKPj menghasilkan rekomendasi DPRD yang wajib dijadikan bahan perbaikan untuk perencanaan pembangunan tahun berjalan dan berikutnya, penyusunan anggaran yang lebih efektif dan penyempurnaan kebijakan strategis kepala daerah.

Secara hukum, penyampaian LKPj diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu kepala daerah w a j i b menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPj menyajikan data realisasi program dan kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga efektivitas pelayanan publik dapat diukur.



Dalam LKPj disampaikan laporan atas capaian Indeks Pembangunan Manusia di Sumedang yang mengalami peningkatan dari 74,57 poin menjadi 75,50 poin. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 74,77 poin.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumedang menurun 0,29%. Capaian ini telah mencapai target yang di tetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 9,09-8,23 persen. Serta tingkat pengangguran terbuka Kabupaten sumedang berhasil di tekan dari 6,16% pada tahun 2024 menjadi 6,08 % pada tahun 2025, menurun hingga 0,08 persen. Capaian ini lebih rendah dari target batas bawah sebesar 6,13 – 6,68 %.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan dari 4,05% tahun 2024 menjadi 5,48 % pada tahun 2025, meningkat 1,43%. Capaian tahun 2025 ini mampu mencapai target yang di tetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 4,79- 5,20%. Selanjutnya, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan dari Rp. 39,70 juta menjadi Rp. Rp. 42,65 juta ddi tahun 2025. Capaian ini malampaui batas target yang di tetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 39,55 - 41,74 juta rupiah.

Realisasi gini ratio naik 0,04 poin dari 0,337 poin tahun 2024 menjadi 0,377 poin tahun 2025, dan ccapaian ini lebih tinggi dari target maksimal yang ditetapkan pada tahun 2025.

Dari capaian indikator makro Kabupaten Sumedang dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan indikator makro pembangunan kabupaten sumedang mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD tahun 2024-2026 kecuali untuk gini ratio yang belum mencapai target.

Namun demikian, kenaikan gini ratio pada tahun 2025 ini tidak berarti seluruhnya bermakna negatif, karena pada faktanya sektor-sektor utama pertumbuhan ekonomi di kabupaten sumedang seperti industri pengolahan yang lebih padat modal tumbuh lebih cepat sebesar 8,07% dimana sebelumnya pada tahun 2024 mengalami kontraksi pada angka -1,13%, sehingga industri pengolahan ini kembali menjadi sumber pertumbuhan utama di kabupaten sumedang selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh 4,88%.

Hal menjadi tantangan ke depan untuk mendorong sektor- sektor padat karya sehingga gini ratio dapat kembali diturunkan. Secara umum gini ratio sebesar 0,377 ini masih berada pada kategori ketimpangan rendah (dibawah 0,4).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, dilaporkan bahwa target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 2,943 triliun, telah terealisasi Rp. 2,904 triliun atau mencapai 98,69%. Target belanja daerah Rp. 3,007 triliun telah terealisasi Rp. 2,913 triliun atau mencapai 96,85%. [v]

Tahun 2025, Tahun yang Tidak Mudah

“Semua tahu bahwa tahun 2025 adalah tahun yang tidak mudah namun akhirnya berhasil melewatinya.”

Atang Setiawan
Wakil Ketua DPRD



Tahun 2025, Pemda Kabupaten Sumedang terengah-engah dengan pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan. Penurunan dana transfer akibat kebijakan pusat mengharuskan perhitungan anggaran yang lebih cermat. Efisiensi dan efektivitas anggaran dilakukan dengan rasionalisasi Kembali semua mata anggaran yang ada.

DPRD Sumedang menyebutkan, tahun 2025 adalah tahun yang tidak mudah bagi Pemkab Sumedang, namun berhasil dilalui. “Semua tahu bahwa tahun 2025 adalah tahun yang tidak mudah namun akhirnya berhasil melewatinya. Salah satunya adalah tercapainya agenda penyerahan LKPj karena ini juga menjadi indikator kinerja pemerintahan daerah pada tahun sebelumnya,” kata Wakil Ketua DPRD Atang Setiawan usai mendampingi Berita Acara Penyerahan LKPj Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD.

Menurut Atang, dari LKPj ini nanti akan diketahui apakah program pembangunan di tahun 2025 terlaksana dengan baik atau tidak di tengah kondisi keuangan yang terbatas.

Keuangan daerah disampaikan dalam LKPj bahwa pada tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 699.219.151.229 atau meningkat 1,18% yaitu sebesar Rp. 8.153.907.165 dari rencana pada APBD 2025 yaitu Rp. 691.065.244.064.

Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, memperhatikan capaian realisasi sampai dengan semester pertama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Uraianya adalah PAD 2025 setelah dilakukan perubahan anggaran yaitu Rp. 699.29.151.229, sedangkan sebelum dilakukan perubahan yaitu sebesar Rp. 691.065.244.064. Terdapat proyeksi kenaikan pendapatan sebesar Rp. 8.153.907.165 atau sebesar 1,18 persen. Sumber proyeksi pendapatan yang naik adalah dari sektor pajak daerah dengan kenaikannya pada perubahan APBD 2025 yaitu Rp. 3.171.670.344 atau sebesar 0,94 persen.

Dari 40 jenis pajak beserta turunannya, hanya ada 4 jenis pajak yang direncanakan naik pada perubahan APBD 2025 yaitu PBB Perkotaan dan Perdesaan naik 5

persen, Opsen Pemilik Kendaraan Bermotor, BPHTB, dan Pajak Restoran dari jenis Pajak Jasa Tertentu.

Sementara, ada beberapa pajak yang tidak direncanakan naik malah direncanakan turun untuk perubahan tahun 2025, yaitu pajak listrik turun 15 persen, pajak hotel turun 24 persen, pajak kesenian seperti tontotan, musik, pagelaran dan lain-lain direncanakan turun 24 persen, dan pajak parkir turun 20 persen.

Pada sektor retribusi, APBD Perubahan Tahun 2025 memproyeksikan kenaikan sebesar 1,61 persen atau sebesar Rp. 5.403.126.933. Dari 30 jenis retribusi dan turunannya, jenis retribusi yang naik diantaranya adalah retribusi pelayanan kesehatan naik 1,52 persen yang diantaranya adalah pelayanan Kesehatan di puskesmas dan di tempat pelayanan kesehatan lainnya. Retribusi pelayanan persampahan juga naik 21,76 persen dan retribusi penyewaan tanah dan bangunan naik 2,65 persen.

Sumber PAD lainnya yang direncanakan naik adalah lain-lain PAD yang sah yaitu naik 85,28 persen yang berasal dari penerimaan tuntutan ganti kerugian keuangan negara dan penerimaan denda PBB P2.

Selain PAD, keuangan daerah juga mendapatkan pemasukan dari dana transfer. Dana Transfer pada Perubahan APBD 2025 direncanakan Rp. 2.240.405.708.762 atau secara umum menurun 0,12% yaitu sebesar Rp. 2.720.261.636,00 dari rencana pada APBD 2025 yaitu Rp. 2.243.125.970.398. Namun, untuk jenis pendapatan transfer dari pusat adalah Rp. 20.918.605.000 atau naik proyeksinya sebesar 0,99 dari APBD 2025. Terdiri atas dana desa, dana insentif fiskal, dan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.

Rinciannya adalah dana insentif fiskal menurun 0,30 persen menjadi Rp. 28.610.956.000. DBH proyeksinya tetap yaitu Rp. 120,7 milyar. DAU direncanakan turun pendapatannya pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar 1,83 persen menjadi Rp. 1.153.025.729.000. DAK naik pendapatannya sebesar 0,12 persen menjadi Rp. 522.181.122.000.

Adapun Pendapatan transfer antar daerah naik 14,91 persen menjadi Rp. 140.225.859.762. [v]

Melaksanakan Amanat Inpres 1 Tahun 2025

Sejak awal bergulirnya APBD 2025, Pemkab Sumedang sudah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini mengacu Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang selanjutnya dipertegas lagi melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah.

Dalam Nota Pengantar LKPj Tahun 2025 Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebutkan, kebijakan belanja pada tahun 2025 beserta dengan perubahan anggarannya, adalah bersifat sebagai akselerasi pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Juga untuk mendukung program-program prioritas pemerintah pusat maupun provinsi. Dalam pemenuhan kebutuhan program tersebut, kebijakan belanja dilakukan berdasarkan efisiensi anggaran. "Sejak awal kebijakan belanja daerah itu tetap mengedepankan efisiensi dengan bersifat pemenuhan program untuk akselerasi seluruhnya," kata bupati.

Dalam upaya efisiensi tersebut, APBD Sumedang mendapatkan beberapa sumber anggaran yaitu dari Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai petunjuk teknis dan sumber dana spesifik lainnya seperti DAU Specific Grant, insentif fiskal, dan lain lain. Serta pemenuhan belanja Standar Pelayanan Minimal serta prioritas pendanaan lainnya dalam rangka pencapaian target pembangunan tahun 2025

dan bersumber pula dari pembayaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa.

Adapun untuk pencapaian program pusat, APBD mendapatkan pendanaan pelaksanaan Koperasi Merah Putih, dukungan pendanaan pembangunan Sekolah Rakyat, dan dukungan pendanaan untuk kegiatan pengelolaan sampah. Dana pusat juga diperuntukkan bagi penguatan pendanaan infrastruktur daerah yaitu infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan dan infrastruktur irigasi.

Sementara, penyesuaian belanja daerah pada Perubahan APBD 2025 diantaranya dipengaruhi oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat NO. 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 dan Penyesuaian KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 2025 serta Penyesuaian Belanja pada Perubahan APBD 2025. [v]



Efisiensi Anggaran Menjadi Solusi



Dari laporan tentang APBD 2025 yaang tercantum dalam LKPj Tahun 2025, Wakil Ketua DPRD Sumedang Atang Setiawan menanggapi bahwa kebijakan efisiensi dapat menjadi solusi ataupun beban dalam sebuah APBD. Hal ini tergantung kepada sudut pandang para penyelenggara pemerintahan.

Namun yang pasti, DPRD dalam kaitannya menjalani fungsi anggaran tidak akan memangkas anggaran tanpa pertimbangan yang berulang. Adapun dasarnya adalah dokumen perencanaan yang ada baik skala nasional maupun daerah.

"Efisiensi anggaran dapat menjadi solusi atau beban tergantung sudut pandang, maka dari itu, adanya kebijakan efisiensi sebaiknya disambut saja dengan baik dan berusaha semaksimal mungkin merealisasikannya,

namun yang pasti dalam penganggarannya tetap tidak akan mengenyampingkan dokumen perencanaan," kata Atang.

Atang juga memastikan, setiap perhitungan kemajuan pembangunan dapat dihitung dengan baik sesuai fakta di lapangan, agar dapat dengan mudah dihitung kembali berapa kekurangan anggaran dan apa yang harus dilakukan.

Rincian anggaran perubahan belanja daerah tahun 2025 adalah Rp. 3,004,297,396,807 dengan realisasi sebesar 96,85 persen. Jumlah ini bertambah 2,55 persen dari rencana belanja daerah pada APBD 2025. Pada jenis belanja operasi, alokasi terbesar adalah untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.285.439.024 yang telah berkurang 3,17 persen dari rencana APBD 2025. Adapun alokasi paling kecil adalah belanja subsidi yaitu Rp. 375.655.000 yang telah bertambah sebesar 93,91 persen dari APBD 2025.

Selain itu, terdapat jenis belanja modal yaitu Rp. 179.851. 836.570 dengan realisasi 94,74 persenn. Jumlah anggaran ini telah bertambah 45,03 persen dari alokasi di APBD 2025. Jenis belanja lainnya adalah belanja transfer yang diperuntukkan belanja bagi hasil adalah Rp. 445.820.874.400 yang telah bertambah sebesar 0,22 persen dari APBD 2025.

Dalam LKPj tentang APBD 2025, bupati juga menyampaikan rekapitulasi plafon APBD berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Diantaranya urusan Pendidikan mengantongi plafon anggaran sebesar Rp. 955.450.154.293, urusan kesehatan mengantongi plafon anggaran Rp. 280.110.742.554, dan urusan pekerjaan umum mendapatkan plafon anggaran Rp. 121.933.100.526.[v]

Perlu Akselerasi, Meski Tumbuh Tinggi di Tahun 2025

Tahun 2025 adalah penjabaran tahun ke dua dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun (RPJMD) 2024-2026. Berdasarkan tema pembangunan tahun 2025 yaitu 'Pembangunan Daerah yang Tangguh, Inklusif, dan Berkelanjutan'. Maka salah satu arah kebijakannya adalah mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor baru seperti pariwisata, UMKM baik ekonomi kreatif maupun penyedia makan minum, dan penyediaan perumahan atau real estate disamping juga tetap menguatkan sektor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.

Kebijakan ekonomi lainnya adalah peningkatan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat. Dilakukan juga penerapan kebijakan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penerapan inovasi teknologi dalam berbagai sektor ekonomi.

Dari kebijakan tersebut, maka telah tergambarlah kondisi kesejahteraan masyarakat yang dianalisis melalui IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Raihan IPM sejak Tahun 2023 konsisten meningkat setiap tahun. Namun di tahun 2025 mampu kembali meningkat cukup tinggi hingga mencapai 75,50 poin dari nilai IPM pada Tahun 2024 yaitu 74,57 poin. Pencapaian IPM Kab. Sumedang pada 2025 berada pada kategori tinggi, yaitu telah tumbuh 1,25% dibandingkan 2024 yaitu 0,74%.

Menurut Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, tren positif pertumbuhan IPM ini masih perlu diakselerasi karena masih berada dibawah capaian Jawa Barat dan nasional.

Sumedang telah unggul pada indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan yang relatif lebih baik. Harapan Lama Sekolah juga cukup tinggi dan Rata-Rata lama Sekolah lebih cukup baik dan pengeluaran perkapita yang mencerminkan indikator pendapatan, pengeluaran perkapita dan paritas daya beli perkapita setahun cukup baik dan meningkat.

Dalam LKPj Tahun 2025, berdasarkan data BPS, raihan Usia Harapan Hidup (UHH) Sumedang pada Tahun 2025 konsisten meningkat setiap tahun yaitu 75,70 tahun dibanding tahun 2024 dengan capaian

75,29 tahun.

"UHH Kabupaten Sumedang yang terus naik menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan UHH Kabupaten Sumedang yang juga tidak lepas dari capaian rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan," kata bupati.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan adalah 96,45%, begitu juga dengan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Masyarakat yang sudah mencapai 94,11% dan prevalensi stunting pada balita yang menurun ke angka 6,74%.

Berkualitasnya penanganan kesehatan di Sumedang tidak terlepas dari adanya ketersediaan program dan kegiatan yang tersedia baik, yang terdiri dari rumah sakit baik swasta maupun milik pemerintah, puskesmas, pelayanan klinik kesehatan lainnya. Terdapat 5 rumah sakit umum, 17 puskesmas rawat inap. 65 puskesmas pembantu, 84 klinik pratama, 14 klinik utama, dan 58 tempat praktik mandiri dokter.

Selain itu, ada 18 tempat mandiri praktik dokter gigi, 6 tempat praktik mandiri dokter spesialis, dan 235 tempat praktik mandiri bidan, dan 9 praktik mandiri perawat. Fasilitas kesehatan lainnya adalah 4 laboratorium kesehatan, 1 unit transfusi darah, 177 apotek, 2 toko obat, dan 1 toko alkes. Penanganan kesehatan di Sumedang juga didukung oleh 235 dokter spesialis dan 513 dokter umum, sehingga jika dirasioikan yaitu tersedia 2,8 dokter untuk per 100 ribu orang penduduk di Sumedang.

Adapun untuk dokter gigi dan dokter gigi spesialis terdapat 156 orang, bidan 1.122 orang, 1.617 perawat, 108 tenaga kesehatan masyarakat, 45 tenaga sanitasi, 64 ahli gizi, dan 573 kefarmasian.

Unsur pembentuk IPM lainnya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan data BPS, RLS tahun 2025 konsisten meningkat setiap tahun yaitu 8,92 tahun dibanding tahun 2024 capaian 8,74. Namun, meski angka RLS masih kecil, angka Harapan Lama Sekolah mencapai 13,21 tahun di tahun 2025 dan 13,02 di tahun 2024. HLS adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun. HLS dihitung untuk menggambarkan potensi atau target pemerataan pendidikan di masa depan. [v]

Tingkat Pengangguran Didominasi Lulusan SMK



Pascapandemi covid beberapa tahun lalu, kondisi yang membaik adalah jumlah pengangguran di Sumedang. Tahun 2025, kondisi ketenagakerjaan lebih baik, ditandai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang disertai penurunan pengangguran, artinya sudah banyak angkatan kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan setelah sebelumnya terdampak pandemi Covid-19, bahkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi.

Dalam LKPj Tahun 2025, TPT di Sumedang dipengaruhi oleh banyaknya penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya di tahun 2020. Setelah itu, TPT kembali menurun lebih cepat, bahkan di tahun 2025 TPT mencapai 6,08% atau sejumlah 37.444 orang dari total angkatan kerja sebesar 61.500 orang. Angka TPT ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 6,16%.

Berdasarkan data, jumlah pencari kerja laki-laki sebanyak 84 persen dan sisanya adalah perempuan. Pencari kerja didominasi oleh lulusan SMK dan sektor terdampak yang terpukul dan memenuhi angka pengangguran

adalah sektor industri dan jasa.

Pertumbuhan TPT pada tahun 2025 menurun drastis yaitu sampai di angka 1,30 persen. Namun, di tahun 2024, pertumbuhan TPT ini sangatlah naik yaitu mencapai 11,24 persen. Pertumbuhan TPT adalah berkurangnya persentase penganggur dibandingkan jumlah angkatan kerja dalam periode tertentu, yang artinya pasar kerja mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tersedia.

Pertumbuhan TPT ini pernah sangat besar angkanya yaitu mencapai 29,62 persen di tahun 2020 atau ketika puncak pandemi terjadi. Di tahun ini, angka pengangguran pun mencapai 9,89 persen. Namun seiring waktu berjalan, angka pengangguran terus berkurang meski di satu sisi terjadi kenaikan jumlah persentase penganggur dibandingkan jumlah angkatan kerja atau. Dengan kata lain, jumlah pencari kerja tumbuh lebih banyak daripada jumlah angkatan kerja itu sendiri.

Angka pengangguran terbuka dipengaruhi oleh dinamika pasar kerja, struktur sektor, serta kebutuhan keterampilan tenaga kerja lokal. Maka, upaya penurunan TPT tetap menjadi fokus kebijakan ketenagakerjaan karena secara langsung berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi dapat memperbesar risiko kemiskinan karena anggota keluarga yang tidak bekerja berkontribusi pada rendahnya pendapatan rumah tangga. Bahkan mereka yang bekerja tetapi dengan jam kerja rendah atau upah kecil (pekerja setengah menganggur/underemployed) bisa tetap rentan terhadap kemiskinan.[v]

Nilai Usaha Barang dan Jasa Capai Rp 50,9 miliar

Melangkah ke tahun 2025, Sumedang menargetkan kesinambungan peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan fokus yang kuat pada pengurangan pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Kondisi perekonomian di Sumedang selama pandemi covid 19 dapat diukur melalui besarnya total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah. Total nilai usaha ini mencapai Rp. 50,991 miliar pada tahun 2025 dan Rp. 47,128 milyar di tahun 2024. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap total nilai barang dan jasa ini adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp. 5.617 miliar di tahun 2025 atau naik dibanding tahun 2024 sebesar Rp. 5.198 dan perdagangan besar dan eceran. Lalu sektor reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai kontribusi sebesar Rp. 5.064 miliardi tahun 2025 atau naik dibanding tahun 2024 sebesar Rp. 4.718 miliar sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi ketiga dalam pembentuk total nilai usaha.

Pemda tetap waspada terhadap dinamika ekonomi global dan domestik yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian sektor industri dan konstruksi.

S t r a t e g i pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan yang lebih stabil dan peningkatan kesejahteraan yang merata. Peningkatan signifikan pada PDRB perkapita juga menjadi indikator positif bahwa hasil pembangunan

ekonomi akan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan, sehingga dipandang penting untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, kondisi ekonomi Sumedang selama masa pandemi covid 19 mengalami penurunan. Namun Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2025 yaitu 5,48% atau peningkatan pertumbuhan ekonomi 1,43 % jika dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,05 % capaian tahun 2025 ini mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yaitu 5,20%.

Sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PRDB Sumedang, sektor yang tumbuh positif yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh 20,27%. Adapun sektor industri pengolahan berkontraksi mengalami perkembangan 18,56%. Sedangkan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor 15,74% dan sektor konstruksi 10,17%. [v]



Tuntas dengan ‘Tuntas’

Tingkat kemiskinan Sumedang sebelum pandemi Covid-19 sudah mencapai 1 digit. Rata-rata persentase penurunan sekitar 3% dari capaian tahun sebelumnya. Dampak pandemi telah menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali bertambah selama 2020-2021, pada 2024 kembali dapat diturunkan menjadi 9,10% atau mampu menurun 2,78% dan pada tahun 2025 dapat diturunkan kembali menjadi 8,81% atau mampu menurun 0,29 poin atau 3,19 % yang menunjukkan adanya perbaikan walaupun masih perlu percepatan lebih lanjut dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Program graduasi kemiskinan di Sumedang merupakan upaya terintegrasi untuk memberdayakan rumah tangga miskin dan miskin ekstrem agar mandiri secara ekonomi dan sosial, melalui pendampingan intensif, fasilitasi usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Pendekatan multidimensi ini berfokus pada keberlanjutan keluarnya rumah tangga dari kemiskinan tanpa ketergantungan bantuan sosial.

Ke depan, penguatan pendampingan, akses pasar, dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar program ini

dapat terus mendukung pengentasan kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang akan memperkuat penanggulangan kemiskinan melalui strategi terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan, dengan pendekatan graduasi yang lebih sistematis. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, program graduasi kemiskinan, pemenuhan layanan dasar, serta pemanfaatan teknologi dan data sebagai alat perencanaan dan monitoring.

Inovasi Bernama “TUNTAS” atau Tumbuh Naik Kelas Lulus Sejahtera diterapkan sebagai model baru dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan graduasi. Inovasi TUNTAS mengintegrasikan berbagai intervensi ekonomi, sosial, dan layanan dasar dengan pendampingan berkelanjutan, pemanfaatan data real-time, serta kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat proses keluarnya rumah tangga dari kemiskinan ekstrem.

Pemanfaatan data Desa Cantik dan DTSEN menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan monitoring program. Data Desa Cantik yang merupakan kolaborasi dengan BPS Sumedang serta 7 perguruan tinggi, digunakan untuk memetakan kerentanan sosial ekonomi di tingkat desa secara akurat. Sementara DTSEN memastikan sinkronisasi data hingga tingkat kabupaten dan provinsi, sehingga intervensi program tepat sasaran dan berbasis bukti.

P e m k a b S u m e d a n g berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem serta mencegah kemiskinan berulang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti. [v]



Pendidikan

Disdik Jalankan Rekomendasi DPRD

DPRD memberikan tiga catatan dan rekomendasi ke Dinas Pendidikan untuk urusan pendidikan pada LKPj 2024. Disdik agar melakukan pemetaan dan pemerataan terkait sarana dan prasarana sesuai ketentuan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu dengan cara efektivitas pemetaan dan pemerataan SPM Sarana dan prasarana.

Melakukan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan, menyusun rencana rekrutmen berdasarkan hasil pemetaan, menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi secara terstruktur dan berkelanjutan, serta melakukan redistribusi dan penataan guru sesuai kualifikasi dan kebutuhan riil sekolah yang dibuktikan melalui data Dapodik/SIMPKB.

Dilakukan juga tindak lanjut berupa identifikasi jumlah, sebaran, dan status Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan data By Name By Address serta menyusun dan melaksanakan strategi penjangkauan untuk mengembalikan ATS ke jalur pendidikan formal, nonformal, atau alternatif lain yang relevan.

Terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk urusan Pendidikan. Tiga indikator menunjukkan pencapaian yang sudah tinggi yaitu persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum. IKU ini diraih dengan angka 80,73 persen dari target 58,88 persen. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi mencapai 77,90 persen dari target 33,12 persen serta nilai siswa dengan tingkat

karakter mencapai hasil 59,20 persen dari target 2,16 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 7–12 tahun. APS yang tinggi mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar. Hal ini didukung oleh ketersediaan satuan pendidikan yang relatif merata, kemudahan akses layanan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sejak usia dini.

APS usia ini adalah mencapai 97,01 persen dari target 99,82 persen. APS usia 13–15 tahun mencapai 94,35 persen dari target 99,76 persen. Pencapaian APS usia 13–15 tahun ini menunjukkan, sebagian besar anak telah terlayani dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal.

Adapun, APS usia 5–6 tahun mencapai angka 94,01 persen dari target 94,11 persen. Kondisi ini relatif dapat mencapai target karena telah tersedianya banyak sarana dan insitusi PAUD di berbagai wilayah di Sumedang. [v]



Kesehatan

Optimalisasi Pelayanan untuk Ibu Hamil dan Bayi



Indeks kepuasan masyarakat di bidang kesehatan mencapai 98,92 persen dari target 94 persen. Sementara, Zona Integritas Perangkat daerah yang mencapai nilai 83,45 poin.

Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam target penurunan jumlah kematian ibu. Dibandingkan dengan kelahiran hidup dalam satu tahun pada tahun 2025, ditetapkan target 85/100.000 kelahiran hidup dan terealisasi dengan capaian 107/100.000 kelahiran hidup.

Dalam pencapaian target terhadap rasio kematian ibu sebesar 74,12%, maka data menunjukkan bahwa pencapaian target tidak tercapai yang menandakan adanya kendala dalam strategi menurunkan Rasio Kematian Ibu. Beberapa penyebab kematian ibu diidentifikasi masih berkisar dari komplikasi kehamilan, seperti perdarahan, infeksi, hipertensi hingga kualitas

pelayanan kesehatan serta sistem rujukan terintegrasi yang belum berjalan sesuai dengan harapan.

Pencapaian target penurunan jumlah kematian bayi telah ditetapkan target 12/1.000 kelahiran hidup dan terealisasi capaian 11,8/1.000 kelahiran hidup. Dalam pencapaian target terhadap rasio kematian ibu sebesar 101,67%. Hasil ini menunjukkan bahwa pencapaian target sudah tercapai dan melebihi batas yang diharapkan.

Untuk pelayanan kepada ibu hamil, dari 14.673 ibu hamil di tahun 2025, telah terlayani sebanyak 83 persen

sesuai pelayanan kesehatan standar. Sedangkan dari jumlah ibu bersalin sebanyak 14.673 pada tahun 2025, telah terlayani sesuai kesehatan standar sebanyak 89 persen. Terdapat juga 86 persen bayi baru lahir sesuai dengan pelayanan kesehatan standar dari jumlah total 14.680 bayi baru lahir di tahun 2025.

Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 9 persen dari jumlah 61.349 balita. Jumlah penderita hipertensi sebanyak 94.523 orang yang terlayani semuanya. Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah 21.005 orang, dan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat adalah 1.703, serta jumlah orang menderita tuberkulosis adalah 24.851 orang.[v]

Pekerjaan Umum

Penanganan Jalan Belum Optimal karena Keterbatasan Anggaran

Kemantapan jalan kabupaten dicapai lebih rendah dari target. Tahun 2025 telah dilakukan penanganan rekonstruksi jalan sepanjang 6,427 km, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 6,6784 km serta rehabilitasi jalan sepanjang 23,6886 km. Dilakukan juga pemeliharaan rutin jalan sepanjang 21,18 km dan telah dapat menambah panjang jalan kondisi mantap sepanjang 719,122 km. Maka, capaian tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2025 sebesar 87,28% (kondisi baik dan sedang).

Penurunan tingkat kemantapan jalan dari 87,54% pada tahun 2024 menjadi 87,28% pada tahun 2025 dipengaruhi oleh keterbatasan penanganan jalan secara menyeluruh. Pada tahun 2025 terjadi penurunan anggaran sekitar 40% dibandingkan tahun 2024, yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, yang selama ini menjadi faktor utama peningkatan kemantapan jalan.

Keterbatasan tersebut menyebabkan sejumlah ruas jalan dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat belum dapat ditangani secara struktural, sehingga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemantapan. Di sisi lain, pemeliharaan rutin dan

berkala tidak memberikan peningkatan signifikan terhadap nilai kemantapan, melainkan hanya berfungsi mempertahankan kondisi eksisting.

Pada tahun 2025, upaya mempertahankan kondisi jalan juga tidak berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini diperburuk oleh banyaknya kejadian longsor yang mengakibatkan terkikis dan amblesnya badan jalan di beberapa ruas, sehingga terjadi degradasi kondisi jalan yang lebih cepat. Akumulasi keterbatasan penanganan struktural dan dampak bencana alam tersebut secara langsung menyebabkan penurunan persentase kemantapan jalan pada tahun 2025. [v]



Pekerjaan Umum

Pelatihan untuk Pengawas Lapangan

Analisa atas pencapaian kinerja utama lainnya adalah terhadap persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten. Atas pencapaian ini, telah dilakukan peningkatan jaringan irigasi permukaan seluas 76,42 hektare. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 92,13 hektare dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi seluas 56,18 hektare yang dapat menambah luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dlayani oleh jaringan irigasi sebesar 21.694 hektare.

Bidang irigasi mempunyai masalah yaitu adanya kegagalan desain kapasitas saluran, kegagalan bangunan irigasi, dan gangguan distribusi air ke petani serta tidak sesuainya antara volume kontrak dengan volume di lapangan sehingga dilakukan pelatihan bagi pengawas dan diadakan monitoring evaluasi.

Selanjutnya, kinerja pada urusan ini juga dicapai dengan pembinaan terhadap 107 penyedia jasa konstruksi sehingga dapat menambah persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan. Serta dilakukan juga penyediaan subsistem pengolahan air limbah domestik (SPALD)

sebanyak 400 rumah tangga sehingga dapat menambah jumlah kumulatif rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebanyak 261.630 rumah tangga.

Pada tahun 2025 telah dilakukan juga pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) jaringan perpipaan sebanyak 872 rumah tangga dan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya sebanyak 64 kawasan sehingga dapat menambah jumlah kumulatif bangunan yang tertata. [v]



Banyak Penghuni Rutilahu Tinggal di Tanah Kas Desa

Keberhasilan pemerintahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditentukan capaian atas tiga indikator. Rasio rumah layak huni yang pada tahun 2025 ini tercapai pada angka 80,58 dari target 80,37 persen. Sedangkan pada tahun 2024, realisasi target kinerja rasio rumah layak huni tahun 2024 sebesar 83,33 persen terealisasi sebesar 80,29 persen.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pada tahun 2025 telah melaksanakan salah satu program perbaikan rumah korban bencana alam. Selain itu persentase penataan kawasan permukiman kumuh yang diremajakan dengan target kinerja 1 hektare. Jumlah luas kawasan kumuh yang ditangani dengan target kinerja 290 unit.

Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Output pada kegiatan ini yaitu jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luarkawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektare yang diperbaiki dengan target kinerja sebanyak 26 unit rumah.

Permasalahan pada urusan ini, status tanah rumah tidak layak huni masih menempati tanah carik desa dan pemda sehingga dilakukan solusi yaitu pihak desa atau pemda dapat menghibahkan atau sewa selama 10 tahun. Masalah lain

adalah banyak calon penerima baru tidak mempunyai swadaya maka dilakukan solusi peningkatan bantuan lebih dari Rp. 20 juta.

Jalan lingkungan masih banyak yang rusak berat, solusi bahwa penyediaan anggaran untuk jalan lingkungan ditingkatkan.

DPRD pada tahun 2025 lalu telah memberikan rekomendaasi yaitu perketat izin pembangunan perumahan di tentang yang bukan peruntukan permukiman.

Dinas telah melakukan koordinaasi dengan dinas terkait atas pemberian izin pemanfaatan ruang. DPRD juga memberikan rekomendasinya yaitu agar melakukan koordinasi dan sinkronisasi ganti kerugian dan santunan tanah atas pemerintah daerah pada proyek kawasan pusat pemerintahan serta direkomendasikan juga untuj mengusulkan penambahan anggaran pendanan tanah ke TAPD.[v]



Menuju WTP ke-11 Beruntun

Komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Wakil Ketua DPRD Atang Setiawan mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 yang diselenggarakan BPK RI secara daring. Entry Meeting digelar di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang, Kamis 3 April 2026.

"Ya, semua harus siap dan mendukung proses pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat," kata Atang.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Tuti

Ruswati Berharap Sumedang tahun ini mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya, yang sebelumnya sudah didapatkan 10 kali secara berturut-turut.

Sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 diserahkan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir ke BPK RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan LKPD merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap kepala daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sumedang siap menerima kedatangan tim pemeriksa dari BPK yang akan mengaudit secara terperinci keuangan pemerintah daerah.

Meraih opini WTP merupakan capaian dan menjadi tolok ukur integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana anggaran digunakan secara baik dan tepat.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan, apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu. Ia berharap proses pemeriksaan yang akan berlangsung dalam 60 hari ke depan dapat menghasilkan opini terbaik bagi seluruh daerah. [*]



Desa Berprestasi Harus Diberi Perhatian Tambahan



Ketua Komisi I DPRD Asep Kurnia menghadiri halal bihalal bersama para kepala desa yang tergabung dalam Apdesi Sumedang di Aula Desa Cikoneng Kulon, Kamis 23 April 2026. Momentum halal bihalal ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan.

Dalam kesempatan itu Asep menyampaikan pentingnya pemerataan bantuan keuangan desa (Bankeudes) yang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga mempertimbangkan kinerja dan prestasi desa. "Pemerataan harus tetap berjalan, namun desa yang berprestasi juga perlu mendapatkan perhatian lebih sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi desa lainnya," ujarnya.

Asep berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilaksanakan pada momentum Idulfitri saja, tetapi dapat dilakukan secara rutin sebagai ruang diskusi dan koordinasi dalam membahas berbagai persoalan pembangunan desa.

"Silaturahmi seperti ini penting untuk terus dijaga. Jangan hanya setelah Lebaran, tapi ke depan bisa rutin dilaksanakan agar komunikasi dan koordinasi semakin kuat," katanya.

Dengan kolaborasi yang kuat antara seluruh elemen, diharapkan pembangunan desa di Sumedang dapat berjalan lebih optimal, merata, dan berkelanjutan.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir didampingi Wakil Bupati M. Fajar Aldila juga hadir. Bupati menekankan, desa merupakan garda terdepan pelayanan publik sekaligus

fondasi utama dalam pembangunan daerah. "Harus memahami bahwa desa adalah wajah pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Jika desa kuat, maka kecamatan dan kabupaten akan kuat, bahkan negara pun akan ikut kuat," tegasnya.

Bupati juga mengajak seluruh jajaran APDESI dan kepala desa untuk terus memperkuat kerja sama dan kolaborasi. "Perkuat kolaborasi, tingkatkan pelayanan yang ramah, mudah, murah, efisien, dan efektif. Yang tidak kalah penting adalah menjaga integritas, karena kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam menjalankan amanah," katanya.

Bupati Dony turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan pemerintah desa atas kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Bupati mengajak seluruh kepala desa untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Kabupaten Sumedang serta aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah. [*]

DPRD Hadir Sebagai Bentuk Dukungan

Ketua DPRD Jafar Sidik menghadiri pemusnahan barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Sumedang, Senin, 30 Maret 2026. Pemusnahan barang bukti perkara pidana merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemusnahan dilakukan terhadap sejumlah barang bukti dari berbagai perkara tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan. Barang bukti yang dimusnahkan di antaranya berupa narkoba, zat sintetis, obat-obatan terlarang, senjata tajam, telepon genggam, serta barang ilegal lainnya yang tidak lagi memiliki nilai guna.

Jafar menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Sumedang beserta seluruh aparat penegak hukum yang secara konsisten dan profesional menjalankan tugas dalam menegakkan hukum. "DPRD hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel," kata Jafar.

Pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari proses hukum yang telah melalui tahapan pengadilan hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dalam rentang waktu Oktober 2025 hingga Februari 2026.

Menurut Jafar, pemusnahan barang bukti menunjukkan proses penegakan hukum di Kabupaten Sumedang berjalan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. "Kegiatan ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum di Sumedang berjalan secara

transparan," katanya.

Langkah tersebut juga menjadi bukti bahwa hukum benar-benar ditegakkan serta menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat maupun penyelenggara negara untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini juga untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan penyelenggara negara agar taat pada hukum, karena hukum benar-benar akan ditegakkan.

Pemerintah daerah bersama Forkopimda akan terus berkolaborasi untuk mewujudkan Sumedang yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif, sekaligus memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Sarta menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian di persidangan maupun perkara lainnya. "Barang bukti yang paling utama adalah narkoba dan psikotropika yang perlu transparansi dalam penyelesaiannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan setelah penanganan perkara selesai," katanya. [*]



Pilkades Serentak dengan Hybrid

KOMISI 1 DPRD menerima audiensi Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) untuk membahas pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Gedung DPRD, Jumat 24 April 2026. Pilkades serentak digelar di 93 desa pada 28 Oktober 2026 nanti.

Ketua FK BPD Sumedang Asep Suryana mengatakan, pembahasan tentang Pilkades menyangkut kebutuhan anggaran. Tahapan Pilkades serentak terdapat delapan tahapan yang memerlukan pembiayaan.

Dalam audiensi itu dibahas rencana penerapan e-voting. Tak hanya soal teknis, BPD juga mengusulkan adanya peningkatan tunjangan kinerja, seiring dengan bertambahnya beban tugas, baik dalam pengawasan Pilkades maupun dalam mendukung program pemerintah di tingkat desa.

Ketua Komisi 1 Asep Kurnia mengatakan, hasil audiensi akan ditindaklanjuti DPRD dengan menggelar rapat kerja dengan Pemkab Sumedang. "DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen melakukan monitoring dan koordinasi berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan Pilkades serentak berjalan aman, lancar," katanya.

Rencana Pilkades serentak secara digital untuk pertama kalinya di Kabupaten Sumedang dipastikan terwujud, kendati hanya sebagian. Pilkades serentak 2026 akan menerapkan kombinasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) digital dan manual.

"Dari total 430 TPS yang disiapkan di 93 desa sebanyak 93 TPS akan menggunakan sistem digital. Sementara 337 TPS lainnya tetap memakai mekanisme manual. Jadi memang untuk TPS digital belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumedang, Widodo Heru Prasetyo.

Menurutnya, kebutuhan biaya untuk satu TPS digital berkisar Rp 4 juta sehingga jika diterapkan di seluruh TPS, anggaran yang dibutuhkan akan jauh lebih besar. Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk Pilkades serentak 2026 sebesar Rp2,5 miliar. "Dengan jumlah 430 TPS yang tersebar di 93 desa, setiap TPS dirancang melayani maksimal 750 pemilih guna menjaga efektivitas dan kelancaran proses pemungutan suara," ujarnya.

Penerapan sistem kombinasi tersebut diharapkan mampu menjamin transparansi, akurasi, dan kelancaran pelaksanaan Pilkades. Tahapan Pilkades serentak akan mulai berjalan sekitar April 2026, sementara pemungutan suara direncanakan berlangsung antara November hingga Desember 2026. [*]



Selamat HARI PERTAHANAN SIPIL

19 APRIL 2026





Hari Jadi
Sumedang
1578 - 2026

